

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat (Hukum Pidana Formal), Jakarta: Penerbit Restu Agung, buku 2, 2006.
- Afiah, Ratna Nurul, Barang Bukti Dalam Proses Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 1989
- Amin, SM, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Jakarta: Pradya Paramita, 1981
- Amirin, Tatang M, Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001,
- Ashofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Hamzah, Andi, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- , Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Ed. Kesatu Jakarta, Sarana Bakti Semesta, 1985.
- , Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, edisi kedua Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Hardjosoemantri, Koesnadi. Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002,
- Harsono, Bambang, Analisis Hubungan Antara Persepsi Pegawai Tentang Efektivitas Program Pendidikan dan Pelatihan, Kemampuan Kerja, Motivasi Kerja, dengan Kinerja Pegawai pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Barat, Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Administrasi, Jakarta. 2006
- HB. Sutopo, Metode Penelitian Kuantitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis). Pusat Penelitian Surakarta, 2002
- Hendrat Puryanto, Susunan Yuridis Pengelolaan Benda Sitaan Negara di Indonesia. Surakarta: Krakatau Surakarta, 2004.
- Hutagalung, MB. Pengelolaan Benda Sitaan Negara, Ditinjau dari Substansi Kepolisian, Deputy Kapolri Bidang Operasi, Jakarta, 1995.
- Loqman, Loebby. Pengelolaan Benda Sitaan Negara, ditinjau dari HakHak Pelanggar Hukum atau Pihak yang berpekara, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 1995.
- Mar, Idris Sarong Al, Penguatan Hutan Dan Aspek-Aspek Hukum, Departemen Kehutanan, Jakarta, 1993
- Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta, 2002,

- Poernomo, Bambang, Pola Dasar teori-Asasi Manusia Dalam KUHAP, Bandung: Poewardarminta, WJS., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Prakoso, Djoko, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana. Yogyakarta: Libert, 1998.
- Prodjodijkoro, Wirjono, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Jakarta: gamedia, 1981
- Prodjohamidjojo, Martiman. Penyelidikan dan Penyidikan. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Purba, Samen, Pengelolaan Benda Sitaan Negara, Direktorat Tindak Pidana Umum Lain, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1995.
- Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Remmelink, Jan. Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Gramedia. Jakarta. 2003.
- Salam, Moch. Faisal, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986
- , Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet., 6, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerodibroto, Soenarto. KUHP dan KUHAP. Rajawali Pers. Jakarta. 2003
- Sugandhi, R.. KUHP dan Penjelasmnya. Usaha Nasional. Surabaya. 1981
- Sukardi, “Pembalakan liar (*illegal logging*), dalam Prespekti Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)”,(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2005)
- Supramono, Gatot, Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan, Bandung: Alunmi, Cet. 1, 1997.
- Supriyadi, Gering, Dasar-Dasar Administrasi Materiil, Lernbaga Administrasi Negara, Jakarta 1998.
- Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 1996

PERATURAN/ UNDANG-UNDANG

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Direktorat Penyuluhan Hukum Dep. Kehakiman RI, Jakarta, 1986.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Direktorat Penyuluhan Hukum Departemen Kehakiman, Jakarta, 1986.

Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara

Keputusan Dirjen Pemasarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI Nornor E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

LAIN-LAIN/ INTERNET

<http://majalah.depkumham.go.id>.2010

<http://www.legalitas.org>; 2010.

<http://hukumonline.com>.2010 informasi Depkumham; 2010.

ARTIKEL

Basmanizar, “Penyelematan dan Pengamanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)”, Makalah dalam rangka Rapat Konsultasi Pembedayaan Petugas Rupbasan di bidang Keamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Cisarua Bogor, November 2002.

Heru Setiana, “Rupbasan Tuntutan Reformasi Hukum”, Warta Pemasarakatan, Nomor,2, Tahun I, April, 2000.

Noor Kolim, “Pokok-Pokok Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan”, Makalah dan Pusdiklat Pegawai Departemen Hukum & HAM RI dalam Acara temu Konsultasi Pemberdayaan Petugas Rupbasan Bidang Penilaian Jenis dan Mutu, Cipayung Bogor, Juli 2005.